OMBUDSMAN BERHARAP SELURUH OPD BERADA PADA ZONA HIJAU

Kamis, 29 Maret 2018 - Ismail Saleh Marsuki

JAYAPURAKOTA - Ombudsman Republik Indonesia melalui Perwakilan Papua pasca pemberian penghargaan kepada dua OPD beberapa waktu lalau, yaitu Dispendukcapil dan DPMPTSP diharapkan mampu diikuti OPD lain. Wakil Wali Kota Jayapura Ir H Rustan Saru, MM dalam beberapa hari belakangan telah melakukan sidak terhadap 18 OPD.

"Sidak ini guna memantau OPD yang dirasa belum memaksimalkan amanat UU Pelayanan Publik dengan harapan memperoleh zona hijau, OPD harus tertib dalam pelayanan, memang sejauh ini belum ada sanksi bagi OPD yang kurang maksimal dalam pelayanan," kata Wakil Wali Kota pasca melakukan sidak bersama perwakilan Ombudsman RI di gedung Otonom Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa 28 Maret 2018.

Di tahun 2017 baru dua OPD yang berada pada posisi aman atua zona hijau, sisanya menempati zona kuning bahkan merah. Pelayanan publik dalam mengamanatkan UU No 25 tahun 2009 menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Jayapura.

Perwakilan Ombudsman RI Ismail Saleh Marsuki mengatakan bahwa pemantauan langsung sebagai bentuk asistensi guna melihat kondisi di lapangan dan membenahi standar pelayanan publik. ''Standar pelayanan tersebut meliputi alur pelayanan atau SOP, maklumat pelayanan, quisioner, kotak saran dan pengaduan, hingga fasilitas umum lain," katanya.

Ombudsman, lanjutnya, dalam waktu dekat akan kembali melakukan pemantauan tanpa adanya pemberitahuan. Sebelum melakukan penilaian, pihaknya akan melakukan pembinaan lalu masuk ke tahap pemeriksaan yang real untuk memperoleh nilai. Nilai tersebut akan dikalkulasi apakah masuk ke zona merah, zona kuning, atau bahkan aman atau zona hijau. Ombudsman juga berharap OPD bisa meingkatkan SOP pelayanan, dan fokus pada hal tersebut karena penilaian tertinggi ada pada standar pelayanan. (HUMAS)

Humas Setda Kota Jayapura